Jurnal Penelitian Nusantara
Volume 2 ; Nomor 11 ; November 2026 ; Page 39-45
Doi : https://doi.org/10.59435/menulis.v2i11.1600
Website : https://padangjurnal.com/index.php/menulis
E-ISSN : 3088-988X

ANALISIS PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA) PROVINSI SUMATERA SELATAN

Muhammad Fadhil Ramadhan, Gusmelia Testiana
Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
muhammadfadhilramadhan_23041450046@radenfatah.ac.id. gusmeliatetstiana_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Transformasi digital menuntut instansi pemerintah daerah mengelola data secara terpusat, konsisten, dan mudah ditelusuri. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki website resmi sebagai media publikasi, tetapi pengelolaan data internal masih semi-manual, tersebar pada komputer dan folder pegawai, serta belum terintegrasi dalam satu sistem informasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi pengelolaan data dan sistem informasi pada BRIDA, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, dan menentukan prioritas penanganannya. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan pegawai dan pembimbing lapangan, serta studi dokumen selama kegiatan kerja praktik pada April hingga Juni 2026. Prioritas masalah ditetapkan dengan metode Urgency, Seriousness, Growth (USG). Hasil analisis menunjukkan lima permasalahan, dengan prioritas tertinggi pada arsip hasil kelitbangan yang belum terpusat (skor 13), diikuti rekap data antarbidang yang belum seragam (skor 11). Sebagai tindak lanjut, disusun usulan struktur pengarsipan digital dan template rekap data standar berbasis spreadsheet dengan validasi data, yang diuji coba terbatas dan memperoleh umpan balik positif. Hasil ini menjadi dasar penyusunan standar operasional prosedur dan pengembangan sistem informasi kelitbangan terintegrasi.

Kata Kunci: Pengelolaan Data, Sistem Informasi, BRIDA, Metode USG, Pengarsipan Digital

PENDAHULUAN

Transformasi digital mendorong instansi pemerintah daerah tidak hanya menyediakan layanan publik berbasis elektronik, tetapi juga mengelola data dan dokumentasi kegiatan secara terpusat, konsisten, dan mudah diakses. Pengelolaan data yang baik menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti dan tata kelola pemerintahan yang transparan. Namun, penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di daerah masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain tata kelola data sektoral yang belum optimal (Widyastuti, 2026), keterbatasan jumlah pegawai pengelola data dan belum adanya SOP (Irawan & Handayani, 2025), serta keterbatasan anggaran dan koordinasi antarperangkat daerah (Nuryana & Junaidi, 2025; Zannuba et al., 2024).

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan data, dokumentasi, dan publikasi hasil kelitbangan. BRIDA telah memiliki *website* resmi sebagai media publikasi. Akan tetapi, hasil observasi dan wawancara selama kerja praktik pada April hingga Juni 2026 menunjukkan bahwa pengelolaan data internal masih semi-manual. Arsip hasil kelitbangan tersimpan pada komputer dan folder masing-masing pegawai, rekap data antarbidang dikelola dalam *spreadsheet* terpisah tanpa validasi sehingga rawan perbedaan versi, dan belum ada sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pimpinan memantau progres kegiatan secara *real-time*. Kondisi ini berpotensi menimbulkan duplikasi data, keterlambatan penyajian informasi, dan kesulitan evaluasi capaian kegiatan.

Solusi yang diharapkan adalah penataan pengelolaan data secara bertahap, dimulai dari permasalahan yang paling mendesak. Penentuan urutan penanganan memerlukan metode prioritas yang terukur. Dalam penelitian ini digunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG), yang menilai masalah dari tingkat kemendesakan, keseriusan dampak, dan potensi berkembangnya masalah (Baktisiswoyo et al., 2022; Fadilla et al., 2025). Hasil prioritas kemudian ditindaklanjuti dengan usulan struktur pengarsipan digital dan *template* rekap data standar.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu yang berdekatan. Zannuba et al. (2024) mengkaji hambatan implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Banyumas, Irawan dan Handayani (2025) menilai implementasinya di Provinsi Banten dan menemukan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif, sedangkan Nuryana dan Junaidi (2025) meneliti peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung sebagai wali data dengan kendala sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi. Padak et al. (2025) menunjukkan bahwa *Google Form* dapat

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

mempercepat dan mengefisienkan pendataan perangkat daerah di Kabupaten Sikka, meskipun terkendala literasi teknologi dan akses internet. Nebore dan Maria (2024) merancang sistem pengelolaan data berbasis web pada BAPPEDA-LITBANG Tambrauw yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk mendukung perencanaan.

Pada aspek kearsipan, Arum dan Ismail (2025) melaksanakan pendampingan klasifikasi, penataan, dan digitalisasi arsip pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, Firmansyah dan Lestari (2026) merancang aplikasi arsip SIARDIN berbasis Python dan SQLite untuk arsip dinamis inaktif di Kantor Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dan Syahruddin dan Hakim (2025) menilai efektivitas sistem kearsipan elektronik SRIKANDI di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau yang masih terkendala aspek teknis, anggaran, dan pemahaman pengguna. Pada aspek publikasi informasi, Ardieansyah (2022) menguji kualitas *website* PPID terhadap kepuasan pengguna di Kabupaten Pemalang, Putri dan Afrilia (2023) membandingkan kualitas *website* pemerintah daerah dalam kerangka *e-government public relations*, Maryanti et al. (2022) meneliti diseminasi informasi publik oleh PPID Kota Banjar, dan Maharani et al. (2026) menilai efektivitas *website* PPID Provinsi Lampung yang masih terkendala masalah teknis dan pembaruan konten yang tidak merata.

Berdasarkan telaah tersebut, penelitian terdahulu umumnya berfokus pada tata kelola Satu Data di dinas komunikasi dan informatika atau badan perencanaan, pengembangan aplikasi atau pendampingan kearsipan pada satu unit, atau kualitas *website* sebagai media layanan informasi. Pada referensi yang ditelaah, belum ditemukan kajian yang menganalisis kondisi pengelolaan data, pengarsipan hasil kelitbangan, dan standarisasi rekap data antarbidang sekaligus pada badan riset dan inovasi daerah, dengan prioritas masalah yang ditetapkan secara terukur menggunakan metode USG. Di sinilah letak kebaruan penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan kondisi pengelolaan data dan sistem informasi pada BRIDA Provinsi Sumatera Selatan, (2) mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, (3) menentukan prioritas penanganan masalah dengan metode USG, dan (4) menyusun usulan penanganan terhadap prioritas utama. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan BRIDA dalam menyusun standar operasional prosedur pengarsipan digital dan format rekap data yang seragam, serta menjadi rujukan bagi penelitian sejenis di instansi pemerintah daerah.

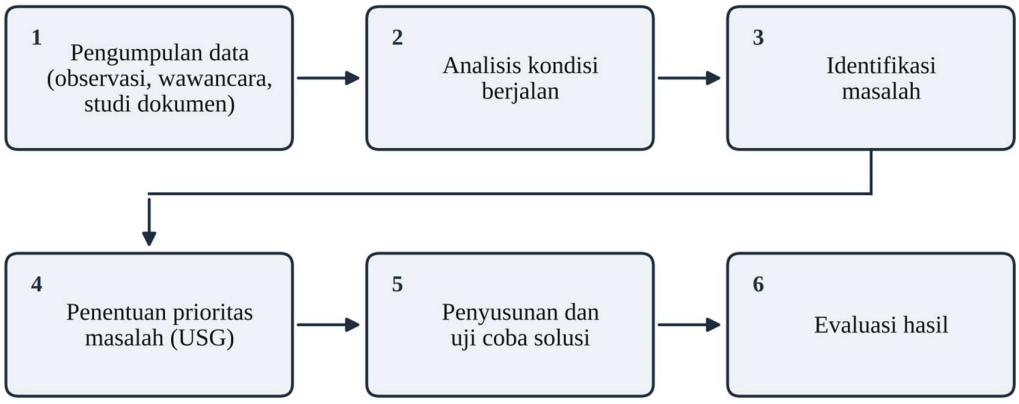
METODE

Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan dukungan penilaian skor pada tahap penentuan prioritas. Penelitian dilaksanakan pada Sub Bagian Perencanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan, Jalan Lorok Pakjo, Kota Palembang, selama kegiatan kerja praktik pada 13 April sampai 30 Juni 2026. Tahapan penelitian ditunjukkan pada Gambar 1 dan terdiri atas enam langkah berikut.

a. Pengumpulan data. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap alur kerja pengelolaan data, dokumentasi kegiatan, dan pemanfaatan *website* brida.sumselprov.go.id; wawancara dengan pegawai dan pembimbing lapangan; serta studi dokumen resmi instansi. Penulis juga terlibat langsung dalam digitalisasi dan pengarsipan dokumen serta penyusunan data untuk portal Satu Data Sumatera Selatan.
b. Analisis kondisi berjalan. Data hasil pengumpulan digunakan untuk menggambarkan kondisi perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta pengelolaan data dan sistem informasi yang berjalan.
c. Identifikasi masalah. Permasalahan dirumuskan dengan membandingkan kondisi berjalan dengan kondisi yang diharapkan, kemudian dicatat beserta sumber datanya.
d. Penentuan prioritas masalah menggunakan metode *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) yang diuraikan pada bagian berikutnya.
e. Penyusunan dan uji coba solusi. Solusi disusun untuk masalah prioritas teratas, didiskusikan bersama pembimbing lapangan, lalu diuji coba secara terbatas.
f. Evaluasi hasil. Hasil uji coba dan umpan balik dari instansi dinilai untuk melihat sejauh mana masalah prioritas terjawab serta kendala yang masih ada.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.



Gambar 1. Tahapan penelitian

Metode Penentuan Prioritas Masalah

Prioritas masalah ditentukan dengan metode USG, yaitu teknik penapisan masalah berdasarkan tiga aspek penilaian (Baktisiswoyo et al., 2022; Fadilla et al., 2025). Ketiga aspek tersebut beserta pertanyaan penilaiannya ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Aspek penilaian metode USG

Aspek	Pertanyaan penilaian	Skala
Urgency (U)	Seberapa mendesak masalah harus diselesaikan dikaitkan dengan waktu yang tersedia	1–5
Seriousness (S)	Seberapa serius dampak masalah terhadap kinerja organisasi bila tidak segera ditangani	1–5
Growth (G)	Seberapa besar kemungkinan masalah berkembang dan menimbulkan masalah baru bila dibiarkan	1–5

Setiap aspek diberi skor 1 (sangat rendah) sampai 5 (sangat tinggi). Skor ketiga aspek dijumlahkan sebagaimana Persamaan (1), dan masalah dengan total tertinggi ditetapkan sebagai prioritas utama.

$$Total = U + S + G \quad (1)$$

dengan U, S, dan G berturut-turut adalah skor *Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth* untuk setiap masalah, dan Total adalah skor total masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis sesuai tahapan penelitian, yaitu kondisi pengelolaan data yang berjalan, permasalahan yang teridentifikasi, prioritas masalah menurut metode USG, serta implementasi dan evaluasi solusi untuk dua masalah prioritas teratas.

Kondisi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi yang Berjalan

Hasil observasi pada Sub Bagian Perencanaan menunjukkan bahwa BRIDA Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki dukungan dasar teknologi informasi. Komputer desktop digunakan terutama untuk pengolahan dokumen dengan Microsoft Office dan akses internet, printer dan *scanner* tersedia untuk pencetakan dan digitalisasi dokumen, serta jaringan internet dapat diakses seluruh pegawai. Pengelolaan data sektoral dilakukan melalui portal BSKDN yang dikelola oleh bidang API, sedangkan *website* resmi brida.sumselprov.go.id yang berjalan pada domain Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memuat profil kelembagaan, tugas pokok dan fungsi, hasil kelitbangan, berita, galeri, informasi akuntabilitas, dan layanan PPID.

Meskipun demikian, pengelolaan data internal masih berjalan semi-manual. Temuan utama pada kondisi berjalan adalah sebagai berikut.

a. Arsip hasil kelitbangan dan dokumen pendukung sebagian besar disimpan secara lokal pada komputer pegawai atau folder bersama dan belum terhubung dengan basis data terpusat.

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

b. Pembaruan berita dan dokumentasi kegiatan bergantung pada admin *website*, sehingga terdapat jeda antara pelaksanaan kegiatan dan publikasinya.
c. Data administratif seperti data pegawai, jadwal kegiatan, dan rekap kelitbangan antarbidang dikelola dalam *spreadsheet* yang terpisah tanpa validasi otomatis, sehingga rawan terjadi perbedaan versi data.
d. Belum tersedia sistem informasi internal terintegrasi untuk pengajuan riset, pelaporan progres, maupun basis data peneliti, sehingga pimpinan belum dapat memantau progres kegiatan secara *real-time*.

Dari sisi sumber daya manusia, pegawai pengelola data memiliki latar belakang keahlian yang beragam dan tidak seluruhnya berasal dari bidang teknologi informasi. Akibatnya, pemanfaatan teknologi masih berada pada tahap operasional dasar, seperti input data dan unggah konten, dan belum mencapai analisis serta pemanfaatan data lanjutan. Pola ini sejalan dengan temuan pada instansi lain, yaitu keterbatasan jumlah pegawai pengelola data dan belum adanya SOP di Provinsi Banten (Irawan & Handayani, 2025), kendala sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung (Nuryana & Junaidi, 2025), serta tata kelola data sektoral yang belum optimal di Jawa Tengah (Widyastuti, 2026). Dengan demikian, persoalan di BRIDA tidak terletak pada ketiadaan perangkat, melainkan pada belum adanya standar dan sistem terpadu yang mengatur cara data dikelola.

Identifikasi Permasalahan

Perbandingan antara kondisi berjalan dan kondisi yang diharapkan menghasilkan lima permasalahan yang ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Identifikasi permasalahan pengelolaan data pada BRIDA Provinsi Sumatera Selatan

No	Permasalahan	Kondisi yang diharapkan	Sumber data
1	Arsip hasil kelitbangan dan dokumen pendukung tersebar pada folder atau komputer masing-masing pegawai dan belum terpusat.	Tersedia media penyimpanan atau basis data terpusat untuk arsip hasil kelitbangan.	Observasi dan wawancara
2	Pembaruan berita dan dokumentasi kegiatan pada *website* terlambat dari waktu pelaksanaan kegiatan.	Input dan publikasi konten dapat dilakukan lebih cepat dan terjadwal.	Observasi lapangan
3	Rekap data kegiatan antarbidang dikelola terpisah dalam *spreadsheet* tanpa validasi, berisiko duplikasi dan inkonsistensi data.	Format pencatatan data seragam dan mudah diverifikasi.	Wawancara pegawai
4	Belum tersedia sistem pemantauan progres kegiatan kelitbangan yang dapat diakses pimpinan secara *real-time*.	Pimpinan dapat memantau capaian kegiatan tanpa menunggu laporan manual.	Observasi dan dokumen instansi
5	Kompetensi digital sebagian pegawai dalam pengelolaan konten dan data perlu ditingkatkan.	Pegawai memiliki kemampuan dasar pengelolaan data dan konten digital yang memadai.	Observasi lapangan

Kelima masalah tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga hal. Masalah 1 dan 3 menyangkut kualitas data pada sumbernya, yaitu arsip yang tersebar dan rekap yang tidak seragam. Masalah 2 dan 4 menyangkut penyajian informasi kepada publik dan pimpinan. Masalah 5 menyangkut kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola data dan konten digital.

Prioritas Masalah dengan Metode USG

Setiap masalah dinilai pada aspek *Urgency*, *Seriousness*, dan *Growth* dengan skala 1 sampai 5 berdasarkan temuan observasi dan wawancara, kemudian dijumlahkan menurut Persamaan (1). Hasil penilaian ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil penetapan prioritas masalah dengan metode USG

No	Permasalahan	U	S	G	Total	Prioritas
1	Arsip hasil kelitbangan belum terpusat	5	4	4	13	I
2	Keterlambatan publikasi berita dan dokumentasi kegiatan	4	3	3	10	III
3	Rekap data antarbidang tidak seragam dan berisiko duplikasi	4	4	3	11	II
4	Belum ada pemantauan progres kegiatan secara *real-time*	3	3	3	9	IV
5	Kompetensi digital pegawai perlu ditingkatkan	3	2	2	7	V

Arsip hasil kelitbangan yang belum terpusat memperoleh total skor tertinggi, yaitu 13 (U=5, S=4, G=4), sehingga ditetapkan sebagai prioritas pertama. Rekap data antarbidang yang belum seragam berada pada prioritas kedua dengan skor 11 (U=4, S=4, G=3). Keterlambatan publikasi (skor 10), ketiadaan pemantauan *real-time* (skor 9), dan kompetensi digital pegawai (skor 7) menempati prioritas ketiga sampai kelima.

Urutan ini dapat dijelaskan oleh keterkaitan antarmasalah. Arsip yang tersebar dan rekap yang tidak seragam berada pada hulu pengelolaan data, sehingga selama keduanya belum tertata, penyajian informasi dan pemantauan progres kegiatan tidak

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

memiliki dasar data yang andal. Pemantauan *real-time* baru dapat dibangun setelah data kegiatan tercatat seragam dan arsip pendukungnya terpusat, sehingga penanganannya bersifat lanjutan. Metode USG sebelumnya dipakai untuk menyaring masalah pada promosi kesehatan (Baktisiswoyo et al., 2022) dan analisis kinerja sistem pompa hidrolik kapal (Fadilla et al., 2025). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang sama dapat digunakan untuk menentukan urutan penanganan masalah pengelolaan data di instansi pemerintah daerah. Perlu dicatat bahwa skor USG merupakan penilaian berbasis temuan lapangan, bukan pengukuran objektif, sehingga hasilnya dapat berbeda bila dinilai oleh pihak lain.

Implementasi

Implementasi difokuskan pada dua masalah prioritas teratas dan dibatasi pada usulan serta uji coba terbatas sesuai ruang lingkup kerja praktik, bukan pengembangan sistem berskala penuh.

Usulan Struktur Pengarsipan Digital

Untuk masalah arsip yang belum terpusat, disusun usulan struktur pengarsipan digital yang terorganisasi berdasarkan bidang, tahun kegiatan, dan jenis dokumen, seperti ditunjukkan pada Tabel 4. Usulan ini disusun dengan mempertimbangkan konsistensi penamaan berkas dan kemudahan pencarian oleh seluruh pegawai.

Tabel 4. Usulan struktur pengarsipan digital hasil kelitbangan

Level	Pengelompokan	Keterangan
1	Bidang	Arsip dikelompokkan menurut bidang di lingkungan BRIDA yang melaksanakan atau menaungi kegiatan.
2	Tahun kegiatan	Setiap bidang dibagi menurut tahun pelaksanaan kegiatan.
3	Jenis dokumen	Dokumen dipisahkan menjadi laporan penelitian, dokumentasi kegiatan, dan bahan publikasi.
–	Penamaan berkas	Penamaan dibuat konsisten pada seluruh berkas untuk memudahkan pencarian.

Sebagai uji coba, sebagian arsip digital yang telah ada dipindahkan dan ditata ke dalam struktur baru tersebut. Hasilnya, waktu pencarian dokumen menjadi lebih singkat karena berkas telah dikelompokkan secara konsisten. Temuan ini bersifat kualitatif berdasarkan pengamatan selama uji coba dan belum disertai pengukuran waktu secara kuantitatif.

Pendekatan ini serupa dengan pendampingan klasifikasi, penataan, dan digitalisasi arsip pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur (Arum & Ismail, 2025). Pada tahap lanjut, aplikasi arsip seperti SIARDIN yang berbasis Python dan SQLite (Firmansyah & Lestari, 2026) dapat menjadi rujukan pengembangan. Namun, pengalaman penerapan SRIKANDI di Provinsi Riau yang masih terkendala aspek teknis, anggaran, dan pemahaman pengguna (Syahruddin & Hakim, 2025) menunjukkan bahwa struktur arsip, secanggih apa pun alatnya, tidak akan berjalan tanpa kesepakatan dan pemahaman pengguna. Hal ini sejalan dengan catatan penelitian bahwa penerapan struktur secara menyeluruh memerlukan SOP pengarsipan digital yang disepakati seluruh bidang.

Template Rekap Data Standar

Untuk masalah rekap data yang tidak seragam, disusun *template* rekap data standar berbasis *spreadsheet* yang dilengkapi validasi data sederhana (*data validation*) dan format kolom yang seragam. Kolom pada *template* ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kolom pada *template* rekap data standar antarbidang

Kolom	Fungsi
Nama kegiatan	Mengidentifikasi kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan.
Bidang pelaksana	Menunjukkan bidang yang bertanggung jawab atas kegiatan.
Periode	Mencatat waktu pelaksanaan kegiatan.
Status/progres	Mencatat perkembangan kegiatan sehingga memudahkan rekapitulasi oleh pimpinan.
Dokumen pendukung	Mencatat dokumen yang mendukung kegiatan dan dapat dihubungkan dengan struktur pengarsipan pada Tabel 4.

Template ini didiskusikan bersama pembimbing lapangan dan diuji cobakan pada salah satu bidang untuk memperoleh umpan balik sebelum direkomendasikan untuk penggunaan yang lebih luas. Umpan balik yang diperoleh pada umumnya positif, dengan catatan perlunya sosialisasi cara pengisian kepada seluruh pegawai terkait. Catatan tersebut sejalan dengan temuan Padak et al. (2025) bahwa pendataan perangkat daerah dengan *Google Form* menjadi lebih cepat dan efisien, tetapi tetap terkendala literasi teknologi dan akses internet. Pilihan solusi berbasis *spreadsheet* yang sederhana juga sesuai dengan batasan kerja praktik dan kompetensi digital pegawai yang beragam. Apabila kelak dikembangkan sistem berbasis web, kolom pada Tabel 5 dapat menjadi dasar rancangan basis data, sebagaimana sistem pengelolaan data berbasis web yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber pada BAPPEDA-LITBANG Tambrauw (Nebore & Maria, 2024).

Kendala dan Evaluasi Hasil

Selama pelaksanaan, terdapat dua kendala. Pertama, akses terhadap sebagian data internal yang bersifat rahasia atau memerlukan izin khusus terbatas. Kedua, jadwal kegiatan magang harus disesuaikan dengan agenda kerja pegawai yang padat, sehingga sebagian sesi bimbingan dan wawancara dijadwalkan ulang.

Secara umum, kontribusi yang diberikan telah menjawab dua dari lima masalah yang teridentifikasi, yaitu pengarsipan hasil kelitbangan dan standarisasi rekap data. Implementasi tersebut masih bersifat awal karena uji coba dilakukan terbatas, yaitu pada

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

sebagian arsip dan satu bidang, dengan umpan balik yang bersifat kualitatif. Penelitian ini juga dilakukan pada satu instansi, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi. Tiga masalah lainnya, yaitu keterlambatan publikasi, ketiadaan pemantauan *real-time*, dan kompetensi digital pegawai, belum ditangani secara khusus dan memerlukan tindak lanjut. Terkait publikasi, kajian pada *website* PPID menunjukkan bahwa pembaruan konten yang tidak merata dapat menjadi hambatan (Maharani et al., 2026), sementara kualitas *website* pemerintah daerah dan diseminasi informasi oleh PPID merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik (Ardieansyah, 2022; Maryanti et al., 2022; Putri & Afrilia, 2023). Karena itu, *website* BRIDA perlu dikelola bukan hanya sebagai media publikasi, tetapi juga sebagai bagian dari pengelolaan data yang terpadu.

Berdasarkan hasil tersebut, tindak lanjut yang diperlukan adalah penyusunan SOP pengarsipan digital dan format rekap data yang berlaku seragam di seluruh bidang, peningkatan kapasitas pegawai dalam pengelolaan data dan konten digital, serta pertimbangan pengembangan sistem informasi kelitbangan terintegrasi agar pimpinan dapat memantau progres kegiatan secara *real-time*.

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengelolaan data dan sistem informasi pada BRIDA Provinsi Sumatera Selatan telah didukung perangkat dasar teknologi informasi dan *website* resmi sebagai media publikasi, tetapi pengelolaan data internalnya masih semi-manual, belum terpusat, dan belum terintegrasi dalam satu sistem. Dari kondisi tersebut teridentifikasi lima permasalahan, yaitu arsip hasil kelitbangan yang belum terpusat, keterlambatan publikasi berita dan dokumentasi kegiatan, rekap data antarbidang yang belum seragam, belum adanya pemantauan progres kegiatan secara *real-time*, serta kompetensi digital pegawai yang perlu ditingkatkan. Berdasarkan metode USG, prioritas pertama ditempati oleh arsip hasil kelitbangan yang belum terpusat (skor 13), disusul rekap data antarbidang yang belum seragam (skor 11), keterlambatan publikasi (skor 10), ketiadaan pemantauan *real-time* (skor 9), dan kompetensi digital pegawai (skor 7). Dengan demikian, persoalan utama BRIDA terletak pada belum adanya standar dan sistem terpadu yang mengatur pengelolaan data, bukan pada ketiadaan perangkat.

Sebagai tindak lanjut atas dua masalah prioritas teratas, disusun usulan struktur pengarsipan digital berdasarkan bidang, tahun kegiatan, dan jenis dokumen, serta *template* rekap data standar berbasis *spreadsheet* dengan validasi data. Uji coba terbatas menunjukkan waktu pencarian dokumen menjadi lebih singkat dan umpan balik terhadap *template* pada umumnya positif, dengan catatan perlunya sosialisasi cara pengisian. Hasil ini masih bersifat awal karena diuji pada sebagian arsip dan satu bidang, bersifat kualitatif, serta dilakukan pada satu instansi sehingga belum dapat digeneralisasi. Tiga masalah lainnya belum ditangani secara khusus. Oleh karena itu, BRIDA disarankan menyusun SOP pengarsipan digital dan format rekap data yang berlaku seragam di seluruh bidang, meningkatkan kapasitas pegawai dalam pengelolaan data dan konten digital, serta mempertimbangkan pengembangan sistem informasi kelitbangan terintegrasi agar pimpinan dapat memantau progres kegiatan secara *real-time*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan selaku penyelenggara Program Magang Berdampak Satu Data Sumatera Selatan Batch 2 Tahun 2026, serta kepada Kepala dan seluruh staf Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan atas kesempatan, fasilitas, dan bimbingan selama kegiatan kerja praktik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Irni Novita, S.Kep., M.P.H. selaku mentor, Bapak Andri, S.Kom., M.Cs. selaku dosen pembimbing lapangan, serta Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Raden Fatah Palembang atas arahan dan dukungan yang diberikan hingga artikel ini dapat disusun.

DAFTAR PUSTAKA

Ardieansyah. (2022). Pengaruh kualitas website "Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)" terhadap kepuasan pengguna di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah, 14*(1), 80–96. https://doi.org/10.33701/jiapd.v14i1.2709

Arum, F. S., & Ismail, H. (2025). Pendampingan pengelolaan sistem kearsipan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. *Proseding Pengabdian kepada Masyarakat, 3*(1), 13–19. https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/puis/article/view/5456

Baktisiswoyo, D. W., Susanto, H., Mahendra, R., Sumantoro, D., & Peristiowati, Y. (2022). Upaya peningkatan kegiatan promosi kesehatan melalui media digital di Puskesmas Pakel Tulungagung. *KREANOVA, 2*(1), 35–42. https://doi.org/10.24034/kreanova.v2i1.5320

Fadilla, A. N., Dirhamsyah, Kusumawati, E., Prawoto, A., Imanto, F., & Robbi, S. D. (2025). Analisis kurang optimalnya sistem pompa hidrolik terhadap kinerja hatch cover di kapal MV. Emerald Indah dengan metode USG. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Teknik, 4*(1), 240–254. https://doi.org/10.55606/jurritek.v4i1.4752

Firmansyah, R. A., & Lestari, Y. (2026). Perancangan aplikasi arsip "SIARDIN" berbasis Python dan SQLite di Kantor Kecamatan Jambangan Kota Surabaya. *Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, 3*(2), 166–177. https://doi.org/10.62383/kajian.v3i2.1065

Irawan, S., & Handayani, R. (2025). Analisis implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Provinsi Banten. *PANDITA: Interdisciplinary Journal of Public Affairs, 8*(1). https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.225

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.

Maharani, A. S., Handayani, A., & Farida, I. (2026). Efektivitas website PPID di Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Provinsi Lampung dalam mempermudah masyarakat mengakses informasi publik. *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science, 3*(6), 917–922. https://jurnal.intekom.id/index.php/njms/article/view/1898

Maryanti, S., Komariah, N., & Rodiah, S. (2022). Diseminasi informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Banjar sebagai upaya keterbukaan informasi publik. *Jurnal MODERAT, 8*(3), 517–533. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2715

Nebore, G. R. C., & Maria, E. (2024). Perancangan sistem pengelolaan data berbasis web di BAPPEDA-LITBANG Tambrauw. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi, 13*(5), 2130–2143. https://doi.org/10.32520/stmsi.v13i5.4527

Nuryana, & Junaidi. (2025). Implementasi kebijakan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Bangka Belitung. *Jurnal Pemerintahan dan Politik, 10*(2), 356–383. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5266

Padak, S. D., Bastian, M. D., & Sedu, V. A. (2025). Pemanfaatan Google Form dalam optimalisasi pendataan SKPD di Kabupaten Sikka: Studi deskriptif kualitatif pada Dinas Kominfo Maumere. *Jurnal Dinamika Pemerintahan, 8*(1), 192–206. https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jdp/article/view/5459

Putri, W. E., & Afrilia, A. M. (2023). Studi komparasi kualitas website pemerintah daerah sebagai implementasi e-government public relations dalam keterbukaan informasi publik. *Jurnal Media dan Komunikasi Indonesia, 4*(2), 143–163. https://journal.ugm.ac.id/jmki/article/view/83056

Syahruddin, & Hakim, A. R. (2025). Efektivitas pengelolaan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi (SRIKANDI) di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau. *JMP: Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 2*(2), 216–223. https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/21809

Widyastuti, A. (2026). Strategi optimalisasi tata kelola data sektoral di Jawa Tengah dalam perwujudan Satu Data. *Jurnal Pembangunan Daerah, 2*(1), 83–101. https://doi.org/10.36762/jpd.v2i1.1335

Zannuba, L. A., Satyawan, D. S., & Wijaya, S. S. (2024). Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada tingkat Pemerintah Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry, 8*(1), 38–58. https://jos.unsoed.ac.id/index.php/ppmi/article/view/11939/5388

CC Attribution-ShareAlike 4.0 License.